

Dr. Hendri: Narasi, Framing, dan Manipulasi Makna dalam Perang Kognitif

Updates. - KORLANTAS.ID

Jan 9, 2026 - 21:33



OPINI - Perang kognitif tidak selalu hadir dalam bentuk serangan terbuka. Ia bekerja lebih halus, lebih dalam, dan sering kali lebih berbahaya karena menyerang cara manusia memahami kenyataan. Dalam perang jenis ini, yang diperebutkan bukan hanya wilayah fisik, melainkan ruang tafsir publik: bagaimana masyarakat membaca peristiwa, menilai kebijakan, mempercayai institusi, membenci lawan, memilih sikap, dan akhirnya mengambil keputusan.

Di era digital, perang kognitif menemukan medan yang sangat subur. Media sosial, kanal berita daring, grup percakapan, video pendek, meme, dan algoritma rekomendasi membuat informasi bergerak sangat cepat. Namun, yang bergerak cepat bukan hanya fakta. Narasi, opini, emosi, kebencian, ketakutan, dan kecurigaan juga bergerak dengan kecepatan yang sama, bahkan sering lebih cepat. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa berita palsu dapat menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam dibandingkan berita benar di platform digital.

Dalam konteks inilah narasi menjadi senjata. Narasi bukan sekadar cerita. Narasi adalah cara menyusun fakta, emosi, tokoh, konflik, korban, pelaku, dan pesan moral agar publik melihat dunia dari sudut tertentu. Satu peristiwa yang sama dapat dibingkai sebagai keberhasilan, kegagalan, pengkhianatan, ancaman, atau ketidakadilan, tergantung siapa yang menyusunnya dan untuk kepentingan apa.

Perang kognitif memanfaatkan narasi untuk membangun realitas tandingan. Publik tidak hanya diberi informasi, tetapi diarahkan untuk merasakan sesuatu: marah kepada pihak tertentu, takut terhadap kelompok tertentu, curiga kepada negara, atau merasa bahwa semua institusi tidak dapat dipercaya. Ketika emosi sudah dibentuk, fakta sering datang terlambat. Bahkan ketika klarifikasi diberikan, misinformasi tetap dapat bertahan dalam ingatan dan memengaruhi penilaian publik, sebagaimana dijelaskan oleh Lewandowsky, Ecker, Seifert, Schwarz, dan Cook (2012).

Di sinilah framing memainkan peran penting. Robert Entman (1993) menjelaskan bahwa framing bekerja dengan memilih aspek tertentu dari realitas, lalu membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Tujuannya adalah membentuk definisi masalah, menentukan penyebab, memberi penilaian moral, dan menawarkan solusi tertentu. Dengan kata lain, framing bukan hanya soal “apa yang diberitakan”, tetapi juga “bagaimana sesuatu diberitakan”.

Framing dapat bekerja secara halus. Sebuah berita tentang demonstrasi, misalnya, dapat dibingkai sebagai ekspresi demokrasi, gangguan ketertiban, gerakan rakyat, ancaman keamanan, atau rekayasa elite. Pilihan kata, foto, judul, kutipan narasumber, urutan informasi, dan konteks yang dihilangkan dapat mengubah makna secara drastis. Di tangan jurnanisme yang bertanggung jawab, framing membantu publik memahami kompleksitas. Tetapi di tangan aktor manipulatif, framing menjadi alat untuk membelokkan persepsi.

Perang kognitif tidak selalu menciptakan kebohongan dari nol. Sering kali ia mengambil fakta yang benar, lalu mengubah maknanya melalui konteks yang dipotong. Sebuah foto lama dipakai untuk peristiwa baru. Sebuah kutipan dipenggal agar terdengar ekstrem. Sebuah data statistik ditampilkan tanpa pembandingan. Sebuah video diedit agar publik hanya melihat bagian yang memancing emosi. Fakta tetap ada, tetapi maknanya telah dimanipulasi.

Inilah yang membuat manipulasi makna lebih berbahaya daripada hoaks biasa. Hoaks dapat dibantah dengan data. Tetapi manipulasi makna lebih licin karena ia sering bersembunyi di balik potongan kebenaran. Publik merasa sedang menerima fakta, padahal sesungguhnya sedang diarahkan untuk menarik kesimpulan tertentu.

Chong dan Druckman (2007) menegaskan bahwa framing berpengaruh terhadap pembentukan opini publik karena cara sebuah isu disajikan dapat mengubah pertimbangan yang digunakan masyarakat dalam mengambil sikap. Maka, dalam perang kognitif, siapa yang menguasai framing akan memiliki peluang besar untuk menguasai persepsi.

Narasi juga bekerja melalui daya tarik psikologis. Green dan Brock (2000) menjelaskan konsep narrative transportation, yaitu kondisi ketika seseorang terserap ke dalam sebuah cerita sehingga cerita tersebut dapat memengaruhi keyakinan dan penilaian. Dalam perang kognitif, cerita yang kuat sering lebih berpengaruh daripada data yang benar. Publik mudah terhubung dengan kisah korban, pengkhianatan, ketidakadilan, atau ancaman identitas, meskipun cerita itu belum tentu utuh dan akurat.

Karena itu, aktor perang kognitif jarang hanya menyebarkan data mentah. Mereka membungkus informasi dalam drama. Mereka menciptakan tokoh baik dan tokoh jahat. Mereka membangun kesan bahwa “rakyat sedang dizalimi”, “negara sedang berbohong”, “media sedang dikendalikan”, “kelompok tertentu sedang mengancam”, atau “kebenaran sengaja disembunyikan”. Narasi seperti ini mudah menyebar karena memberi publik rasa memiliki posisi moral.

Masalahnya, ketika publik sudah merasa berada di pihak moral yang benar, kemampuan berpikir kritis sering menurun. Orang tidak lagi bertanya apakah informasi itu akurat, tetapi apakah informasi itu sesuai dengan kemarahan atau keyakinannya. Pennycook dan Rand (2019) menunjukkan bahwa kerentanan terhadap berita palsu lebih banyak berkaitan dengan rendahnya penalaran analitis daripada sekadar bias politik. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya diajak “melawan hoaks”; masyarakat juga harus dilatih untuk berpikir lebih lambat, lebih teliti, dan lebih reflektif.

Perang kognitif juga memanfaatkan polarisasi. Dalam ruang digital, publik mudah terjebak dalam kelompok yang hanya mengafirmasi keyakinan sendiri. Ketika seseorang terus-menerus menerima narasi yang sama, ia akan merasa narasi itu adalah kebenaran umum. Padahal, bisa jadi ia hanya berada dalam ruang gema informasi. Akibatnya, perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi sebagai ancaman yang harus dilawan.

Pada titik ini, manipulasi makna dapat merusak kepercayaan sosial. Masyarakat menjadi curiga kepada pemerintah, media, akademisi, aparat, bahkan sesama warga. Setiap klarifikasi dianggap pembelaan. Setiap data dianggap rekayasa. Setiap perbedaan dianggap permusuhan. Jika kondisi ini dibiarkan, ruang publik akan kehilangan fondasi rasionalnya.

Perang kognitif tidak selalu bertujuan membuat publik percaya pada satu kebohongan. Tujuan yang lebih berbahaya adalah membuat publik tidak lagi percaya pada apa pun. Ketika semua sumber dianggap sama-sama bohong, masyarakat akan mengalami kelelahan epistemik: lelah membedakan benar dan salah. Dalam situasi seperti itu, kebenaran kehilangan daya ikat, dan yang menang adalah narasi paling emosional, paling keras, dan paling sering diulang.

Karena itu, menghadapi perang kognitif tidak cukup dengan membantah hoaks

satu per satu. Yang harus dibangun adalah ketahanan makna. Masyarakat perlu dibekali kemampuan membaca narasi, membongkar framing, dan mengenali manipulasi makna. Literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi harus naik menjadi literasi kognitif: kemampuan memahami bagaimana pikiran, emosi, dan persepsi dapat dimanipulasi.

Ada beberapa pertanyaan sederhana yang perlu dibiasakan dalam masyarakat digital. Siapa yang membuat narasi ini? Kepentingan apa yang mungkin bekerja di baliknya? Fakta apa yang ditonjolkan? Fakta apa yang disembunyikan? Kata-kata apa yang dipakai untuk memancing emosi? Apakah judul sesuai dengan isi? Apakah foto dan video sesuai konteks? Apakah ada sumber lain yang lebih kredibel?

Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sangat strategis. Dalam perang kognitif, kemampuan bertanya adalah bentuk pertahanan. Masyarakat yang terbiasa bertanya tidak mudah digiring. Masyarakat yang terbiasa memeriksa tidak mudah diprovokasi. Masyarakat yang terbiasa membandingkan sumber tidak mudah dijadikan alat penyebaran manipulasi.

Pemerintah, media, kampus, sekolah, organisasi masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara cepat, terbuka, dan konsisten agar ruang kosong tidak diisi rumor. Media harus menjaga disiplin verifikasi dan tidak terjebak dalam ekonomi klik. Kampus dan sekolah harus mengajarkan analisis wacana, literasi media, dan etika digital. Keluarga juga perlu membangun budaya diskusi agar anak-anak tidak tumbuh sebagai konsumen pasif algoritma.

Pendekatan pencegahan juga penting. Roozenbeek et al. (2022) menunjukkan bahwa inokulasi psikologis dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap misinformasi di media sosial. Artinya, publik perlu dikenalkan lebih awal pada pola-pola manipulasi: penggunaan emosi berlebihan, kambing hitam, dikotomi palsu, teori konspirasi, otoritas palsu, dan pemotongan konteks. Dengan mengenali pola serangan sebelum terpapar, masyarakat akan lebih siap menolak manipulasi.

Pada akhirnya, perang kognitif adalah perang atas makna. Siapa yang mampu mengatur makna, ia dapat mengatur persepsi. Siapa yang mampu mengatur persepsi, ia dapat memengaruhi sikap. Siapa yang mampu memengaruhi sikap, ia dapat menggerakkan tindakan publik.

Karena itu, menjaga akal sehat di ruang digital bukan sekadar urusan pribadi. Ia adalah bagian dari ketahanan sosial dan ketahanan nasional. Dalam zaman ketika narasi dapat dijadikan senjata, framing dapat membelokkan realitas, dan makna dapat dimanipulasi, masyarakat membutuhkan kecerdasan yang lebih dari sekadar kemampuan membaca informasi. Masyarakat membutuhkan keberanian untuk berpikir jernih.

Perang kognitif hanya akan berhasil jika publik kehilangan kemampuan membedakan fakta dari tafsir, informasi dari propaganda, dan kritik dari provokasi. Sebaliknya, ia akan gagal ketika masyarakat memiliki daya kritis, media menjaga integritas, dan negara hadir dengan komunikasi publik yang jujur. Di tengah banjir narasi dan manipulasi makna, berpikir kritis adalah garis

pertahanan pertama bangsa.

Jakarta, 09 Januari 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)